

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tersusun, sebagai bentuk laporan penyelenggaraan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Kunci.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD dan LKPj. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, menggambarkan kinerja yang telah dicapai serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LPPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang barokah. Aamiiiin.....!

Benteng, Januari 2025
KEPALA DLH,


MUH. TAUFIK KADIR, ST.,M.M
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19720303 200604 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum DLH	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH .	1
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak, dan Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi	4
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	8
2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	8
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome	12
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	14
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	15
3.1 Dasar Hukum.....	15
3.2 Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan	15
3.3 Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	14
1. Target.....	14

2. Realisasi Kinerja.....	15
3.4 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	15
3.5 Saran dan Tindak Lanjut.....	15
BAB IV PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan	4
Tabel 2. Data Jabatan Struktural	5
Tabel 3. Data Jabatan Fungsional	6
Tabel 4. Jumlah Tenaga Kontrak	7
Tabel 5. Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output DLH	9
Tabel 6. Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome DLH	13
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan DLH Tahun 2024.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum DLH



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 35, Benteng Selayar, 92812 Sulawesi Selatan.Telepon (0414) 21263, Email: dislhksly@gmail.com. Berada pada titik koordinat 6°07'21.6"S 120°27'33.3"E. Adapun Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tipe B adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretaris
3. 3 (tiga) Bidang
4. 3 (tiga) Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DLH

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-

bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang

menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian-subbagian yang berada di dalam sekretariat masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sementara itu, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada

Kepala Dinas. Seksi-seksi yang ada di dalam tiap bidang. , bertanggung jawab secara langsung kepada masing-masing Kepala Bidang.

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak, dan Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi.

Secara umum Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023 sebanyak 31 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13 Orang dan Perempuan Sebanyak 18 Orang dengan Klasifikasi menurut tingkat pendidikan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak, dan Jabatan Struktural yang Belum Terisi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 01. Klasifikasi PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	4	5
STRATA 1	5	12	17
DIPLOMA 4	0	0	0
DIPLOMA 3	0	2	2
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	6	0	6
SLTP	1	0	1
Jumlah	13	18	31

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 01 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- ✓ S2 = 5 Orang
- ✓ S1 = 17 Orang
- ✓ D III = 2 Orang
- ✓ SLTA = 6 Orang
- ✓ SLTP = 1 Orang

Tabel 02. Data Jabatan Struktural

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II/b	1	0	1
Eselon III/a	1	0	1
Eselon III/b	0	3	3
Eselon IV/a	0	4	4
Eselon IV/b	0	1	1
Fungsional	4	6	10
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	6
Operator Layanan Operasional	2	0	2
Jumlah	14	17	31

Berdasarkan Tabel 02 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebagai berikut:

- ✓ Eselon II/b = 1 Orang
- ✓ Eselon III/a = 1 Orang
- ✓ Eselon III/b = 3 Orang
- ✓ Eselon IV/a = 4 Orang
- ✓ Eselon IV/b = 1 Orang

- ✓ Fungsional = 10 Orang
- ✓ Penelaah Teknis Kebijakan = 3 Orang
- ✓ Pengadministrasi Perkantoran = 6 Orang
- ✓ Operator Layanan Operasional = 2 Orang

Tabel 03. Data Jabatan Fungsional

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Arsiparis	1	1	2
Pengendali Dampak Lingkungan	0	4	4
Pengawas Lingkungan Hidup	3	1	4
Jumlah	4	6	10

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 03 diatas, jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pangkat adalah sebagai berikut:

1. Arsiparis = 2 Orang
2. Pengendali Dampak Lingkungan = 4 Orang
3. Pengawas Lingkungan Hidup = 4 Orang

Sedangkan untuk Jumlah Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 04. Jumlah Tenaga Kontrak (PHL)

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Operator Satuan Kerja Pengelola Aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	2	0	2
Operator Komputer	2	3	5
Operator Onlimo	1	0	1
Pengadministrasi Umum	3	9	12
Penagih Retribusi	0	22	22
Sopir Mobil Jabatan	1	0	1
Koordinator Bank Sampah	1	0	1
Sopir Mobil Sampah	13	0	13
Sopir Motor Sampah	24	0	24
Kernek Mobil Sampah	39	0	39
Petugas Administrasi Bank Sampah	0	2	2
Petugas Operasional Bank Sampah	7	12	19
Petugas Operasional TPA	4	7	11
Operator Alat Berat	2	0	2
Co. Alat Berat	1	0	1
Petugas Cek Point TPA	0	1	1
Pembersih Drainase	21	0	21
Penyapu Jalan	23	75	98
Pembersih	18	19	37
Jumlah	162	150	312

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

Tabel 04. Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah	0	0	0

Sumber: Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum DLH Tahun 2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator

Kinerja Kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2020)

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 05. Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	LINGKUNGAN HIDUP						
		316	Hasil perhitungan provinsi terhadap:				
			a. Indeks kualitas air (IKA)	$IKA = 100 - (Pij / 10\%)$ $IKA = 100 - (500 / 10\%)$		52,22	https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (50 / 0,9 \times (IEU - 0,1))$ $IKU = 100 - (50 / 0,9 \times ((0,44 + 0,17) / 2 - 0,1))$		94,56	https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login
			c. Indeks tutupan hutan (ITH)	$TH = 0,7973$ $IKTH = 100 - ((84,3(TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$ $IKTH = (100 - ((84,3 - (0,7973 \times 100)) \times 50 / 54,3))$		44,39	https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login
		317	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	DLH
		318	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Jumlah Usulan Permohonan yang terintegrasi}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	DLH
		319	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap provinsi terhadap	$\frac{\text{Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi}}{\text{Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU}} \times 100\%$	$\frac{4}{6} \times 100\%$	66,67%	DLH

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	LH yang diterbitkan pemerintah kab/kota				
		320 Penetapan hak MHA, Kearifan Lokal terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Desa yang ditetapkan keberadaannya sebagai MHA, Kearifan Lokal terkait PPLH ----- x 100% Jumlah desa keseluruhan	n/a	n/a	DLH	
		321 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		n/a	n/a	DLH	
		322 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		n/a	n/a	DLH	
		323 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100 % Total Jumlah Pengaduan Masyarakat	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	DLH	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.					

2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

Indikator Kinerja Kunci Hasil merupakan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang. Pengukuran indikator outcome atau hasil kerja seringkali rancu dengan pengukuran indikator output atau keluaran. Indikator outcome lebih bermakna daripada output, karena walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Berikut adalah Indikator Kinerja Kunci Hasil pada Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024:

Tabel 06. Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome Dinas Lingkungan Hidup

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Lingkungan Hidup							
		57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 30\%) + (\text{IKD } 30\%) + (\text{ITH } 40\%).$ IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan		64,25	https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/lojin	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total volume timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{4.879,73}{23.503,52} \times 100\%$	20,76%	DLH	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota}}{\text{usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{2}{7} \times 100\%$	28,57%	DLH	

2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan Indikator kinerja kunci (IKK) untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup :

Tabel 07. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan DLH Tahun 2024

NO.	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Perencanaan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP		
2.	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total	97,85 %	DLH	11.035.043.316 -----x100% 11.277.055.300
		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	95,44%	DLH	491.527.500 -----x100% 515.000.000
		Assets Management	Asset tercantum	DLH	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,11 %	DLH	242.011.984 -----x100% 11.454.666.192

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun (2024)

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1 Dasar Hukum

(NIHIL)

3.2 Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

(NIHIL)

3.3 Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

1. Target Kinerja

(NIHIL)

2. Realisasi Kinerja

(NIHIL)

3.4 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

(NIHIL)

3.5 Saran dan Tindak Lanjut

(NIHIL)

BAB IV

PENUTUP

Terlaksananya seluruh urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah otonomi dengan hasil baik yang diraih berkat kerja sama dan sinergitas pemerintah dengan DPRD bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2024 telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan.

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini. Secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Pencapaian kinerja diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya.